

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
KEMENKO POLHUKAM

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau kegagalan Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.



Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tahun 2018, yang terkait dengan proses pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2018, dan sekaligus merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidkooor Kamtibmas tahun 2018 diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada Menko Polhukam dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidkooor Kamtibmas tahun 2018 belumlah sempurna karena masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan dukungan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dimasa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas tahun 2018 ini. Semoga bermanfaat dan dapat memacu kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Deputy Bidkooor Kamtibmas



Carlo B. Tewu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	12
B. Dasar Hukum	13
C. Struktur Organisasi	13
D. Tugas dan Fungsi	14
E. Aspek Strategis Organisasi	15
F. Permasalahan Utama	15
G. Sumber Daya Organisasi / Sumber Daya Manusia	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	18
1. Visi, Misi dan Tujuan	18
2. Sasaran dan Indikator Kerja	18
3. Strategi Kebijakan	19
B. Rencana Kinerja Tahunan	19
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	22
B. Analisis Capaian Kinerja	24
1. Analisis Sasaran Strategis I	24
a. Penyelesaian tidak pidana konvensional	14
b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara.....	19
c. Penyelesaian tindak pidana transnasional	23

d. Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi	28
2. Analisis Sasaran Strategis II	44
a. Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran	44
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	45
3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
a. Sumber Daya Keuangan	46
b. Sumber Daya Manusia.....	47
C. Pencapaian Kinerja Lainnya	47
D. Realisasi Anggaran	50

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Struktur Organisasi	12
Tabel 1.2.	Perencanaan Anggaran Tahun 2018.....	16
Tabel 1.3.	Personil Kedeputan Bidkooor Kamtibmas.....	17
Tabel 2.1	Strategi Kebijakan Kedeputan Bidkooor Kamtibmas	19
Tabel 2.2	Perencanaan Anggaran Tahun 2018	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018	23
Tabel 3.2	Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	24
Tabel 3.3	Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional Tahun 2017 dan Tahun 2018	27
Tabel 3.4	Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Tahun 2017 dan Tahun 2018	32
Tabel 3.5	Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional Tahun 2017 Dan Tahun 2018	38
Tabel 3.6	Rekapitulasi Data Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi Tahun 2017 dan Tahun 2018	42
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Tahun 2018	43
Tabel 3.8	Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	44
Tabel 3.9	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018.....	44
Tabel 3.10	Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Di Lingkungan Kemenko Polhukam TA. 2018	45
Tabel 3.11	Sumber Daya Keuangan	46
Tabel 3.12	Anggaran Berbasis Kinerja	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 maka capaian kinerja masing-masing unit kerja perlu dilaporkan sehingga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi.

Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja selanjutnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputusan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2018 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2018 sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :			
	a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;	55%	61%	111%
	b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;	60%	61%	101%
	c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;	65%	83%	127%
	d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	60%	71%	118%
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase realisasi penyerapan anggaran;	90%	99%	110%
	b. Nilai akuntabilitas kinerja.	BB	79,32 (BB)	112%

Capaian Sasaran Strategis terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sebagai berikut:

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait penyelesaian tindak pidana pada tahun 2018 adalah rata-rata sebesar **64 %**. Prosentase penyelesaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kedeputan Bidkooor Kamtibmas yaitu rata-rata sebesar 60%. Untuk menelaah jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaiannya,

maka perlu melihat perkembangan jumlah tindak pidana yang terjadi. Rincian dari trend penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Penyelesaian Tidak Pidana Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri yang terdiri dari 59 jenis kejahatan. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, maka selama periode tahun 2018 Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

- a. Rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara adalah Rekomendasi dituangkan dalam Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan Panglima TNI dan Kapolri Nomor:R 77/KM.00.01/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pengamanan tenaga kesehatan di Papua Barat.
- b. Rekomendasi dari Menko polhukam kepada Kapolda Kabareskrim Polri, Dirjen Perhubungan Laut Kemhub, Kapolda Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, Kepala BP Batam, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Batam Nomor R-33/KM.00.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi tindak lanjut permohonan perlindungan hukum terkait permasalahan keamanan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA.
- c. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Kapolda Kepulauan Riau, Kepala KSOP Batam dan Direktur Utama Bulk Black Sea Inc Nomor : R-101/KM.00.01/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi tindak lanjut permohonan perlindungan hukum terkait permasalahan keamanan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Telah ditindaklanjuti oleh Polri dan TNI dalam melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan upaya penanganan tenaga kesehatan di Papua dan di Papua Barat.
- b. Dilaksanakan pengecekan lapangan oleh Polda Kepri c.q Ditpol Air Polda Kepri

- c. Bareskrim Polri dan Dit.Krimum Polda Kepri telah melaksanakan percepatan penyelidikan dan penyidikan kasus kasus yang dilaporkan terkait dengan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA

2. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, maka selama periode tahun 2018 Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

- a. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Kapolri dan Jaksa Agung Nomor: R-19/KM.00.01/4/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
- b. Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Kementerian LHK, Gubernur Maluku, dan Deputi Bidkooor Instruktur Kemenko Memaritim Nomor R-117/KM.00.01/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi evaluasi penanganan penambanagn tanpa ijin di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Prov. Maluku.

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- a. Telah dibangun aplikasi berbasis teknologi Digital oleh Pusdiknas Polri untuk menghimpun seluruh data penegakan hukum yang dilaksanakan oleh K/L yang mempunyai Tupoksi penegakan hukum.
- b. Ditindaklanjuti rapat di Kemenko Kemaritim dan disepakati untuk penyelesaian permasalahan di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku akan ditangani oleh Badan pengelola kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

3 Penyelesaian tindak pidana transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedepuitan Bidkooor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana Transnasional. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana Transnasional adalah :

- a. Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Sesmeko PMK, Sekjen Kemlu, Gubernur Aceh, Walikota Langsa dan Bupati Bireuen Nomor : B-1811/KM.00.02/9/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Penyampain hasil pelaksanaan rapat koordinasi membahas penanganan pengungsi Rohingya, Myanmar yang berada di Prov. Aceh;
- b. Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B-1430/KM.00.02/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas implementasi Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
- c. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menteri Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Menko Sekneg, Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkominfo, Menag, Mensos, Menperu, Menkes, Menkeu, Menhub, Menteri Pariwisata, Mendikbud, Menpora, Menristekdikti, Mentan, Menteri BUMN, MenkoUKM, Mennaker, Menteri ESDM, Menteri KKP, Menteri PP/Kepala Bappenas, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, Ka BIN, Ka PPATK, KSP, Ka BNP2TKI., Ka BSSN, Ketua LPSK, dan Ketua KPAI Nomor : R-95/KM.00.01/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas rencana pelaksanaan operasi "BAYU-01".
- d. Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Walikota Langsa, Bupati Bireuen dan Kepala Divisi Imigrasi Aceh Nomor: B-1022/KM.00.02/5/2018 tanggal 28 Mei 2018

Perihal Penanganan Pengungsi Etnis Rohingnya yang berada di Kab. Bireun, Prov. Aceh

- e. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Kadiv Imigrasi Sulawesi Selatan dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar Nomor : B-456/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengawasan keimigrasian pengungsi yang bertempat tinggal di tempat penampungan sementara (Community House) di Kota Makassar
- f. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam, kepada TNI AL melalui Lantamal IV/Tanjung Pinang, BNN Propinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Narkoba Polda Kepri Nomor : B-457/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil pelaksanaan rakor penanggulangan penyelundupan narkoba di wilayah Kepulauan Riau
- g. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang Nomor : B-454/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil rapat koordinasi membahas implementasi Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota
- h. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Sekretaris BPOM, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan, Kabareskrim Polri Nomor B-876/KM.00.02/5/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan FGD dengan tema "Kebijakan dan Strategi Efektif dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan obat terlarang/ilegal.
- i. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Politik dan Pemerintah Umum, Kemendagri, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu, Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Nomor B-2006/KM.00.02/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan kunjungan kerja ke Thailand dalam rangka penanganan pengungsi dari Luar Negeri
- j. Rekomendasi dari Deputi Bidkoo Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bupati Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo dan

Kapolres Sidoarjo Nomor B-1876/KM.00.02/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan rapat koordinasi membahas penanganan permasalahan pengungsi di Wisma Puspo Agro, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

- k. Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sekretaris Utama BNPT, Kadensus 88 AT, Kasatgas Keris Solo Raya, Walikota Solo, Bupati Klaten, Bupati Karanganyar, Bupati Sragen, Bupati Wonogiri, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Nomor R-131/KM.00.02/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Hasil Rakor Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerjasama Pemerintah Daerah dalam mendukung operasi Satas Keris Solo Raya
- l. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Mendagri, Kemenpan & RB, Kepala BNN Nomor : B. 272/KM.00.02/11/2018, tanggal 21 November 2018 tentang hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi evaluasi implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pecegahan dan Pmberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NARKotika dan Prekursor NARKotika (P4GN) tahun 2018-2019 oleh Pemda
- m. Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Kepala BNPP, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Nomor : B-2296/ KM.00.02/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dengan Lembaga Internasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penanganan pengungsi dari Luar Negeri
- n. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Presiden RI Nomor B-33/K.M.00.02/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- a. Ditindaklanjutinya penanganan pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Kab. Bireuen, Provinsi Aceh oleh Pemprov Aceh;

- b. Ditindaklanjutnya Inpres No. 6 tahun 2018 tentang RAN P4GN oleh Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Perda baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
- c. Ditindaklanjutnya hasil pelaksanaan rapat koordiansi membahas penanganan permasalahan pengungsi di Wisma Puspo Agro, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur oleh Pemkab Sidoarjo, dan Divisi Imigrasi Jawa Timur

4. Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan transportasi

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gubernur Banten, Dirjen Migas Kementerian ESDM Nomor : B-384/KM.02.03/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hasil koordinasi penanganan konflik sosial kegiatan reklamasi oleh PT. Multimas Nabati Asahan (PT. MNA) dan PT. Shensua Gouhua Pembangkitan Jawa-Bali (PT. SGPJB)
- b. Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Kabareskrim Polri, Dirjen Penanganan Masalah Agraria Kementerian ATR/BPN, dan JAM Pidum Kejaksaan Agung, Gubernur Riau, Bupati Kampar, Bupati Pelalawan, Bupati Kuantan Singingi, Kapolda Riau, Kajati Riau, Danrem 031/Wirabima Nomor: B-439/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyampaian hasil koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus TN Tessonilo
- c. Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kabareskrim Polri, Gubernur Riau, Bupati Kampar Nomor: B-440/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang

Tindaklanjut penyelesaian perambahan hutan di luar HGU PT. Ciliandra Perkasa (PT. Pertisa) di Provinsi Riau

- d. Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Marga Kementerian PUPR dan Dirut PT. Jasa Marga (Persero), Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Walikota Bitung dan Bupati Minahasa Utara Nomor: 441/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Hasil koordinasi membahas pengaduan masalah tanah dengan rincian pengaduan atas pelanggaran prosedur, aturan, dan UU Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara
- e. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Kapolri, Panglima TNI Nomor: B-80/KM.02.03/4/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas gangguan keamanan/ permasalahan yang menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN)
- f. Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Para Gubernur, Para Bupati dan Para Walikota Nomor : R-94/KM.00.01/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas keamanan dan keselamatan transportasi angkutan sungai, danau dan perairan (ASDP).

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan rapat membahas mitigasi resiko terkait kegiatan reklamasi PT MNA dan PT SGPJB yang dihadiri oleh Ditjen Migas. Salah satu hasil point mitigasi resiko adalah akan memastikan desain sehingga tidak menimbulkan deformasi pipa.
- b. Pembentukan Tim Implementasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo telah dibentuk berdasarkan SK MenLHK No. SK 72/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 07 Februari 2018. Tim tersebut melakukan bedah kinerja atas ijin-ijin konsesi disekitar kawasan ekosistem Tesso Nilo dan menyusun master plan dan site plan pengelolaan kawasan ekosistem Tesso Nilo dengan prinsip pengembangan berbasis masyarakat.
- c. Laporan Bupati Kampar kepada Menko Polhukam melalui Surat Nomor: 525/DISBUN/191 tanggal 13 Agustus 2018 yang memuat penyelesaian konflik PT. Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

- d. Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas gangguan keamanan/permasalahan yang menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Nomor S-33/D.VI.M.EKON.KPPIP /04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Permohonan dukungan penyelesaian permasalahan lahan kereta api Bandara Adi Sumarmo.

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2
Target dan realisasi kinerja tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2018	% Capaian
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%	98,92%	110%
	2. Nilai akuntabilitas kinerja	BB	79,32 (BB)	79,32 (BB)

1. Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputan Bidkooor Kamtibmas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.979.131.684 dari Rp. 14.132.270.000. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 153.138.316 (daya serap 98,92 %).

Analisa dari penyerapan anggaran yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018

UNIT SATKER	PAGU	TARGET	REALISASI	%	SISA
Deputi V/ Kamtibmas	14.132.270.000	90%	13.979.131.684	98,92 %	153.138.316
Asdep 1	3.317.317.000	-	3.273.403.499	98,67 %	43.913.501
Asdep 2	1.513.060.000	-	1.503.470.635	99,37 %	9.589.365
Asdep 3	3.031.812.000	-	3.026.034.042	99,81 %	5.777.958
Asdep 4	5.363.153.000	-	5.295.146.260	98,73 %	68.006.740
Sesdep	906.928.000	-	881.077.248	97,15 %	25,850,752

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2018 nilai akuntabilitas kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas adalah sebesar 79,32 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor perencanaan kinerja 23,29% (skala 30%);
- b. Skor pengukuran kinerja 20,10% (skala 25%);
- c. Skor Pelaporan kinerja 13,00% (skala 15%);
- d. Skor evaluasi kinerja 7,75% (skala 10%);
- e. Skor capaian kinerja 15,18% (skala 20%).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Capaian kinerja masing-masing unit kerja perlu dilaporkan sehingga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan dan tantangan kedepan yang mengindikasikan perlunya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja organisasi. Permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi yang intens dan berkesinambungan. Pada pelaksanaannya membutuhkan kecepatan dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan, serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi situasi keamanan secara nasional, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi melalui koordinasi semua unsur secara solid dan efektif.

Hasil pencapaian kinerja yang disusun dalam bentuk laporan merupakan amanat dari Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja selanjutnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Deputi Bidkooor Kamtibmas Kamtibmas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidkooor Kamtibmas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidkooor Kamtibmas Tahun 2018 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

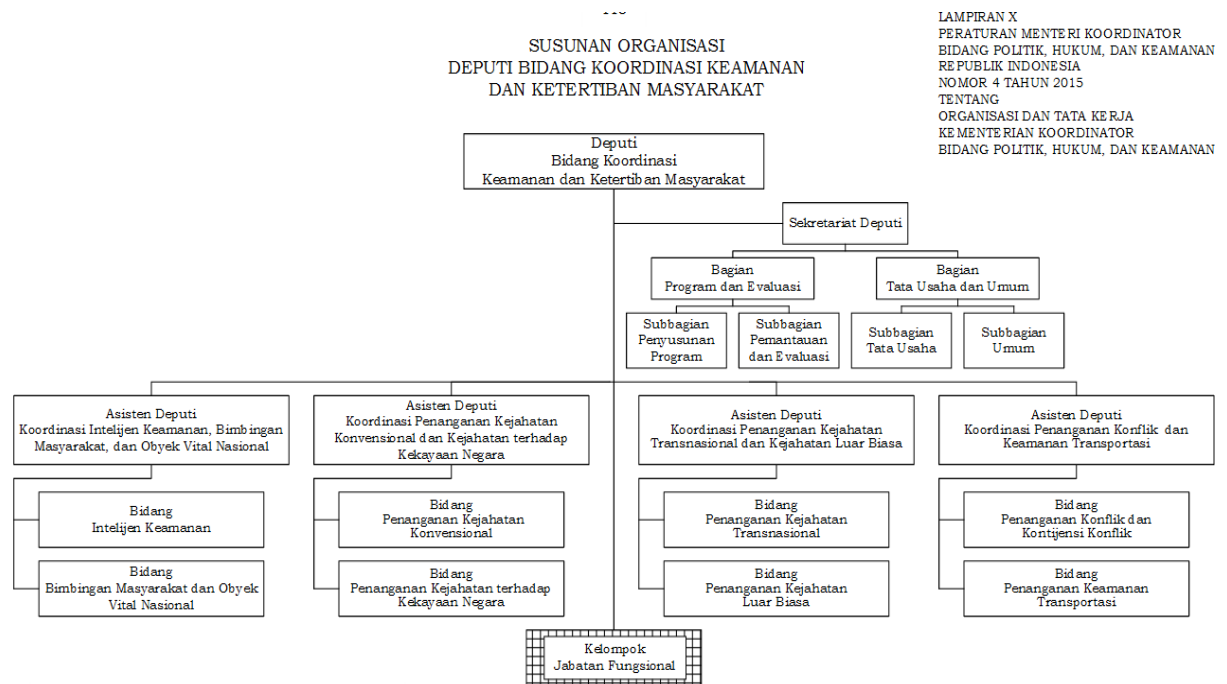
B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Struktur Organisasi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Drs. Subroto, M.M.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka Deputi Bidkooor Kamtibmas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Merujuk pada peraturan tersebut, Deputi Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam, stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. sehingga diharapkan tujuan Deputy Bidkooor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud.

E. Aspek Strategis Organisasi

Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. Untuk menkoordinasikan Kementerian terkait guna mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat menjadi tanggung jawab Deputy Bidkooor Kamtibmas. Deputy Bidkooor Kamtibmas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menko Polhukam. Stabilitas keamanan merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga diharapkan tujuan Deputy Bidkooor Kamtibmas yaitu terwujudnya efektifitas koordinasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang didukung oleh sumber daya yang akuntabel dan modern bisa terwujud.

F. Permasalahan Utama

Prioritas nasional stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari prasyarat yang mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, Sektor Unggulan serta Pemerataan dan Kewilayahan. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban akan berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan pada ketiga dimensi tersebut. *Clerance Rate* atau penyelesaian tindak pidana masih

berkisar pada angka 60 persen ditahun 2017 dan 2018. Hal ini tidak menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, permasalahan utama dari stabilitas keamanan dan ketertiban adalah penanggulangan aspek keamanan khususnya terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu :

1. Kejahatan Konvensional;
2. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara;
3. Kejahatan Transnasional;
4. Kejahatan Yang Berimplikasi Kontijensi.

Untuk itu, penyelesaian perkara pada 4 jenis tindak pidana tersebut harus menjadi prioritas pertama untuk dikoordinasikan pencapaian target penyelesaiannya agar situasi kamtibmas yang kondusif dapat terwujud.

G. Sumber Daya Organisasi/Sumber Daya Manusia

1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputan Bidkooor Kamtibmas tahun anggaran 2018 sebesar **Rp. 25.763.225.000**, namun terjadi efisiensi anggaran di awal tahun anggaran sebesar Rp. **10.183.235.000** dan sebesar Rp. **1.447.720.000** pada pertengahan tahun, sehingga DIPA Kedeputan Bidkooor Kamtibmas tahun anggaran 2018 sebesar Rp. **14.132.270.000** seperti tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Perencanaan Anggaran Tahun 2018

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)
1	Belanja Barang	25.763.225.000
	Efisiensi Anggaran Awal Tahun	10.183.235.000
2	Belanja Barang setelah efisiensi	15.579.990.000
	Efisiensi Anggaran Pertengahan Tahun	1.447.720.000
3	Belanja Barang setelah efisiensi	14.132.270.000

2. Sumber Daya Manusia

Tabel 1.3
Personil Kedeputian Bidkoor Kamtibmas

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Eselon 1	Lemhanas	1
2	Eselon 2	Lemhanas/Sespimti Polri	5
3	Eselon 3	Sespimen Polri	10
4	Eselon 4	Setukpa Polri/S1	4
5	Fungsional/Analisis	S1	6
6	PPNPN	SMA/D3/S1	5
JUMLAH PERSONIL			31

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Kedeputian Bidkooor Kamtibmas adalah “Terwujudnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai”.

Misi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas adalah:

- a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkooor Kamtibmas dalam pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan pada tahun 2018 adalah terwujudnya “Efektifitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya yang Profesional”.

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis Deputi Bidkooor Kamtibmas merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah:

- a. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);
- b. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

3. Strategi Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Kedeputian Bidkooor Kamtibmas didasarkan pada arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tabel 2.1
Strategi Kebijakan Kedeputian Bidkooor Kamtibmas

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<ul style="list-style-type: none">• Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi.• Peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja.	<ul style="list-style-type: none">• Koordinasi meningkatkan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan luar biasa, penanganan konflik dan tindak kejahatan berimplementasi kontijensi.• Meningkatkan kualitas sumber daya organisasi dengan menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidkooor Kamtibmas tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 25.763.225.000, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perencanaan Anggaran Tahun 2018

JENIS BELANJA	PAGU (RP)
❖ Belanja Barang	25.763.225.000
- Efisiensi Anggaran Awal Tahun	10.183.235.000
❖ Belanja Barang setelah efisiensi	15.579.990.000
- Efisiensi Anggaran Tengah Tahun	1.447.720.000
❖ Belanja Barang setelah efisiensi	14.132.270.000

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja tersebut dijabarkan dengan program kegiatan yang diuraikan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
<p>1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);</p>	<p>Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :</p> <p>a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;</p> <p>b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;</p> <p>c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;</p> <p>d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.</p>	<p>55%</p> <p>60%</p> <p>65%</p> <p>60%</p>
<p>2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas</p>	<p>a. Presentase realisasi penyerapan anggaran;</p> <p>b. Nilai akuntabilitas kinerja.</p>	<p>90%</p> <p>BB</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2018 Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L/D untuk dapat memenuhi sasaran strategis yang dibebankan kepada organisasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi, pemantapan koordinasi, monitoring dan evaluasi, *Focus Group Discussion* dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam sehingga mendorong harmonisasi serta sinkronisasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2018.

Realisasi anggaran pada TA.2018 Kedeputian Bidkooor Kamtibmas secara umum telah terlaksana dengan baik dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar **98,92%** (total PAGU anggaran **Rp. 14.132.270.000,-** dengan serapan **Rp. 13.979.131.684,-**).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :						
	a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;	70%	55%	55%	61%	78%	111%
	b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;	70%	60%	63%	61%	90%	101%
	c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;	70%	65%	75%	83%	107%	127%
	d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	70%	60%	78%	71%	114%	118%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase realisasi penyerapan anggaran	-	90%	-	99%	-	110%
	b. Nilai akuntabilitas kinerja	70	BB	70,35	79,32 (BB)	103%	112%

B. Analisis Capaian Kinerja

Mencermati dinamika situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2018 yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis global maupun regional secara masif mempengaruhi bidang ekonomi yang membawa dampak terhadap situasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia.

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputan Bidkooor Kamtibmas. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 sasaran strategis, 6 indikator kinerja, dengan besaran target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut, sebagai berikut:

1. Analisis Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Indikator: Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

a. Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.2
Target dan realisasi kinerja tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian kinerja 2018 %
Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :			
a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;	55%	61%	111%
b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;	60%	61%	101%
c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;	65%	83%	127%
d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	60%	71%	118%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait penyelesaian tindak pidana pada tahun 2018 adalah rata-rata sebesar **64 %**. Prosentase penyelesaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidkooor Kamtibmas yaitu rata-rata sebesar 60%. Untuk menelaah jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaiannya, maka perlu melihat perkembangan jumlah tindak pidana yang terjadi. Rincian dari trend penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1) Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri yang terdiri dari 59 jenis kejahatan. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, maka selama periode tahun 2018 Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

- a) Rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara adalah Rekomendasi dituangkan dalam Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan Panglima TNI dan Kapolri Nomor:R 77/KM.00.01/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pengamanan tenaga kesehatan di Papua Barat.
- b) Rekomendasi dari Menko polhukam kepada Kapolda Kabareskrim Polri, Dirjen Perhubungan Laut Kemhub, Kapolda Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, Kepala BP Batam, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Batam Nomor R-33/KM.00.01/04/2018 tanggal 23 April 2018 perihal penyampaian hasil rapat koordinasi tindak lanjut permohonan perlindungan hukum terkait permasalahan keamanan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA.

- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Kapolda Kepulauan Riau, Kepala KSOP Batam dan Direktur Utama Bulk Black Sea Inc Nomor : R-101/KM.00.01/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi tindak lanjut permohonan perlindungan hukum terkait permasalahan keamanan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a) Telah ditindaklanjuti oleh Polri dan TNI dalam melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan upaya penanganan tenaga kesehatan di Papua dan di Papua Barat.
- b) Dilaksanakan pengecekan lapangan oleh Polda Kepri c.q Ditpol Air Polda Kepri
- c) Bareskrim Polri dan Dit.Krimum Polda Kepri telah melaksanakan percepatan penyelidikan dan penyidikan kasus kasus yang dilaporkan terkait dengan kapal MV NEHA eks kapal MV. SENIHA

Selain rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas telah melakukan rapat koordinasi dengan K/L terkait yang membahas tentang :

- a) Evaluasi penanganan kejahatan konvensional;
- b) Evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kejahatan konvensional;

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidkooor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana konvensional berkontribusi pada penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Data Kejahatan Konvensional
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	KEJAHATAN KONVENSIONAL	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Sengaja Menimbulkan Kebakaran/Banjir (Pembakaran).	552	271	521	299
2	Karena Alpa Menimbulkan Kebakaran/Meletus/Banjir	1.173	838	944	695
3	Memberi Suap.	16	9	18	20
4	Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu.	319	212	331	253
5	Pemalsuan Materai.	171	111	151	84
6	Pemalsuan Surat.	2.926	1.455	2.509	1.422
7	Perzinahan.	1.881	1.354	1.346	935
8	Perkosaan.	1.545	1.121	1.288	853
9	Permainan Judi.	8.714	8.155	5.573	5.333
10	Penghinaan.	3.207	1.988	2.724	1.952
11	Penculikan.	274	180	222	185
12	Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan.	2.511	1.718	1.719	1.435
13	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang/Pembunuhan.	1.198	1.013	1.024	867
14	Penganiayaan Berat.	13.731	10.417	11.191	8.584
15	Mengakibatkan Orang Mati.	643	2.346	632	797
16	Mengakibatkan Orang Luka.	1.567	1.037	948	733

17	Pencurian Biasa.	25.564	11.676	25.269	12.762
18	Pencurian Dengan Pemberatan.	40.047	20.319	31.571	19.364
19	Pencurian Ringan.	2.597	1.164	2.166	1.281
20	Pencurian Dengan Kekerasan.	10.202	5.209	7.410	4.736
21	Pemerasan Dan Pengancaman.	5.512	3.457	4.649	3.083
22	Penggelapan.	21.174	11.593	17.813	10.624
23	Penipuan/Perbuatan Curang.	28.404	14.020	25.077	13.078
24	Tipu Gelap.	4.193	1.850	2.623	1.319
25	Menghancurkan Atau Merusak Barang.	6.174	3.549	4.910	2.756
26	Menerima Suap.	307	342	169	155
27	Penadahan.	602	1.242	755	1.524
28	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur.	2.537	1.874	2.323	1.735
29	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	7.820	5.532	8.067	5.813
30	Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak.	1.272	1.600	947	801
31	Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal)	263	206	640	113
32	Haki	184	109	76	53
33	Curanmor R2	36.834	10.834	26.617	8.717
34	Curanmor R4	1.963	711	1.114	397
35	Curas Senpi	216	70	151	60
36	Curas Sajam	1110	900	862	760
37	Obat Keras	748	389	485	419

38	Pemilikan Senpi Ilegal	243	182	271	210
39	Thdp Kam Negara	73	83	464	333
40	Thdp Pres/Wa	110	60	1	7
41	Han Berbahaya	48	40	177	152
42	Perbankan	88	44	38	18
43	Prod & Dagang	109	41	611	39
44	Sara	13	15	14	-
45	Curwat Tlp	15	9	5	5
46	Curi Kayu	48	19	30	9
47	Aborsi	122	45	52	62
48	Pencurian Dlm Lingkungan Keluarga	162	145	105	89
49	Laka Lantas Korban Mati	2.938	1.688	2.459	1.075
50	Laka Kereta Api Korban Mati	137	135	50	54
51	Laka Laut Korban Mati	19	6	13	10
52	Premanisme	2.458	2.248	2.568	2.046
53	Cabul	4.038	2.767	3.970	2.939
54	Penyerobotan.	1.728	845	1.515	761
55	Pencemaran Nama Baik.	784	420	809	457
56	Pornografi.	130	115	247	173
57	Ekstradisi.	15	11	9	10
58	Lahgun Jabatan.	944	593	404	298
59	Kejahatan Konvensional Lainnya	34.291	19.122	25.304	20.476
	JUMLAH	286.664	157.504 (55%)	233.951	143.220 (61%)
	Capaian Kinerja	78%		111%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak **286.664 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **157.504 kasus (55%)**. Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak **233.951 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **143.220 kasus (61%)**. Dari perbandingan di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **78%** dan capaian kinerja pada, tahun 2018 sebesar **111%**. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah pencurian, curanmor dan penipuan.

Dari data yang ada, terdapat beberapa jenis kejahatan konvensional yang penyelesaiannya rendah yaitu kasus-kasus perampokan. Beberapa jenis kejahatan konvensional yang sebenarnya dapat ditingkatkan penyelesaiannya adalah kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan karena unsur-unsur yang mendukung penindakan tindak pidana sudah terpenuhi dan kasus kecelakaan lalu lintas terbuka untuk diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau penyelesaian di luar pengadilan.

Analisa keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana konvensional adalah :

- a) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 55% adalah terdapat beberapa jenis kejahatan yang jumlah penyelesaian tindak pidananya cukup signifikan, diantaranya penadahan.
- b) Salah satu faktor penyebab keberhasilan penyelesaian tindak pidana konvensional adalah telah terselesaikannya kasus-kasus yang menjadi tunggakan pada periode sebelumnya. Contohnya kasus penadahan dengan jumlah tindak pidana sebanyak 755 kasus dengan penyelesaiannya sebanyak 1.524 kasus;
- c) Sudah adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan diantaranya memasang kamera cctv adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan melalui

aplikasi online Polisiko yang memudahkan Kepolisian dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut.

2) Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara

Kejahatan terhadap kekayaan negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh K/L yang bertugas melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas, maka selama periode tahun 2018 Kedepuyan Bidkoo Kamtibmas telah mengeluarkan beberapa rekomendasi, yaitu :

- a) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Kapolri dan Jaksa Agung Nomor: R-19/KM.00.01/4/2018 tanggal 23 April 2018 perihal Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi
- b) Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Kementerian LHK, Gubernur Maluku, dan Deputi Bidkoo Instruktur Kemenko Maritim Nomor R-117/KM.00.01/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi evaluasi penanganan penambanagn tanpa ijin di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Prov. Maluku.

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- a) Telah dibangun aplikasi berbasis teknologi Digital oleh Pusdiknas Polri untuk menghimpun seluruh data penegakan hukum yang dilaksanakan oleh K/L yang mempunyai Tupoksi penegakan hukum.
- b) Ditindaklanjuti rapat di Kemenko Maritim dan disepakati untuk penyelesaian permasalahan di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku akan ditangani oleh Badan pengelola kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedepuyan Bidkoo Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara berkontribusi pada penyelesaian tindak pidana yang terjadi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Rekapitulasi Data Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Korupsi	530	399	496	437
2	<i>Illegal Logging</i>	901	620	724	543
3	<i>Illegal Fishing</i>	112	77	87	55
4	<i>Illegal Mining/</i> Pertambangan	308	246	436	346
5	Lingkungan Hidup	82	48	120	53
6	Fiskal dan Perpajakan	16	10	103	49
7	BBM Illegal	460	374	417	251
8	Penyelundupan	73	34	70	59
9	Kepabeanan dan Cukai	21	6	14	10
10	Telekomunikasi	202	62	615	279
11	Karantina	71	40	104	91
12	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	594	348	97	69
13	Satwa	23	16	11	1
14	Pangan dan Perlindungan Konsumen	601	244	333	186
15	Sumber Daya Air	34	39	79	42
16	Budidaya Tanaman	17	13	15	3
17	Perkebunan	192	160	124	74
18	SNI dan Perlindungan Konsumen	135	73	184	115
19	Kesehatan	101	51	165	81
20	Migas	231	141	336	149
21	Hak Siar dan Hak Cipta	227	107	148	59
22	Cagar Budaya	5	3	3	0
23	Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya	661	390	758	354
	JUMLAH	5.597	3.501 (63%)	5.439	3.306 (61%)
	Capaian Kinerja	90%		101%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak **5.597 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **3.501 kasus (63%)**. Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak

5.439 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **3.306 kasus (61%)**. Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **90%** dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **101%**. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah *illegal logging*, telekomunikasi, dan korupsi.

Analisis penyebab keberhasilannya dalam pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara sebagai berikut:

- a) Penyebab berhasil pemenuhan target penyelesaian tindak pidana sebesar 60% adalah telah berjalannya dengan baik fungsi penyidik Polri sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Hal ini membuat kemampuan penyelesaian tindak pidana oleh PPNS lebih optimal;
- b) Kasus korupsi merupakan kejahatan terhadap kekayaan negara yang pada tahun 2018 terjadi sebesar 496 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 437 kasus atau sebesar 88 %. Selanjutnya kasus karantina yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 104 kasus dengan penyelesaian sebanyak 91 kasus atau sebesar 88%.

Adapun solusi agar penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara menjadi lebih baik adalah :

- a) Dari *political will*, mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang mendukung penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;
- b) Penanganan pada sisi-sisi peluang-peluang terjadinya *White Colour Crime* (membangun sistem kontrol hingga menempatkan orang-orang yang mampu menjaga marwah penegakkan hukum maupun pencegahan *WCC*);
- c) Melakukan edukasi dan disebarluaskan ke publik secara langsung maupun media agar dapat diketahui apa, bagaimana, mengapa

WCC terjadi dan dapat mengajak segenap warga peduli berperan serta untuk cara-cara pencegahannya;

- d) Penegakkan hukum yang tegas, tidak tebang pilih dan berdampak pada adanya efek jera.

3) Penyelesaian tindak pidana transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputan Bidkooor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana Transnasional. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana Transnasional adalah :

- a) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Sesmeko PMK, Sekjen Kemlu, Gubernur Aceh, Walikota Langsa dan Bupati Bireuen Nomor : B-1811/KM.00.02/9/2018 tanggal 25 September 2018 Perihal Penyampain hasil pelaksanaan rapat koordinasi membahas penanganan pengungsi Rohingya, Myanmar yang berada di Prov. Aceh;
- b) Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : B-1430/KM.00.02/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas implementasi Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi;
- c) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menteri Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Menko Sekneg, Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkominfo, Menag, Mensos, Menperu, Menkes, Menkeu, Menhub, Menteri Pariwisata, Mendikbud, Menpora, Menristekdikti, Mentan, Menteri BUMN,

MenkoUKM, Mennaker, Menteri ESDM, Menteri KKP, Menteri PP/Kepala Bappenas, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Panglima TNI, Kapolri, Kejagung, Ka BIN, Ka PPATK, KSP, Ka BNP2TKI., Ka BSSN, Ketua LPSK, dan Ketua KPAI Nomor : R-95/KM.00.01/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas rencana pelaksanaan operasi “BAYU-01”.

- d) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Walikota Langsa, Bupati Bireuen dan Kepala Divisi Imigrasi Aceh Nomor: B-1022/KM.00.02/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 Perihal Penanganan Pengungsi Etnis Rohingnya yang berada di Kab. Bireun, Prov. Aceh
- e) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Kadiv Imigrasi Sulawesi Selatan dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar Nomor : B-456/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pengawasan keimigrasian pengungsi yang bertempat tinggal di tempat penampungan sementara (Community House) di Kota Makassar
- f) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam, kepada TNI AL melalui Lantamal IV/Tanjung Pinang, BNN Propinsi Kepulauan Riau dan Direktorat Narkoba Polda Kepri Nomor : B-457/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil pelaksanaan rakor penanggulangan penyelundupan narkoba di wilayah Kepulauan Riau
- g) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang Nomor : B-454/KM.00.02/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Tindak lanjut hasil rapat koordinasi membahas implementasi Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh instansi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota

- h) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Sekretaris BPOM, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan, Kabareskrim Polri Nomor B-876/KM.00.02/5/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan FGD dengan tema "Kebijakan dan Strategi Efektif dalam upaya pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan obat terlarang/ilegal.
- i) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu, Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Nomor B-2006/KM.00.02/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan kunjungan kerja ke Thailand dalam rangka penanganan pengungsi dari Luar Negeri
- j) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bupati Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo dan Kapolres Sidoarjo Nomor B-1876/KM.00.02/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penyampaian hasil pelaksanaan rapat koordinasi membahas penanganan permasalahan pengungsi di Wisma Puspo Agro, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- k) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sekretaris Utama BNPT, Kadensus 88 AT, Kasatgas Keris Solo Raya, Walikota Solo, Bupati Klaten, Bupati Karanganyar, Bupati Sragen, Bupati Wonogiri, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Nomor R-131/KM.00.02/11/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Hasil Rakor Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerjasama Pemerintah Daerah dalam mendukung operasi Satas Keris Solo Raya
- l) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Mendagri, Kemenpan & RB, Kepala BNN Nomor : B. 272/KM.00.02/11/2018, tanggal 21 November 2018 tentang hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi evaluasi implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pecegahan dan Pmberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) tahun 2018-2019 oleh Pemda

- m) Rekomendasi dari Deputi Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam kepada Kepala BNPP, Dirjen Polpum Kemendagri, dan Dirjen Imigrasi Kemendikhum Nomor : B-2296/ KM.00.02/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga dengan Lembaga Internasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penanganan pengungsi dari Luar Negeri
- n) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Presiden RI Nomor B-33/K.M.00.02/02/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- a) Ditindaklanjutinya penanganan pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Kab. Bireuen, Provinsi Aceh oleh Pemprov Aceh;
- b) Ditindaklanjutinya Inpres No. 6 tahun 2018 tentang RAN P4GN oleh Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Perda baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
- c) Ditindaklanjutinya hasil pelaksanaan rapat koordinasi membahas penanganan permasalahan pengungsi di Wisma Puspo Agro, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur oleh Pemkab Sidoarjo, dan Divisi Imigrasi Jawa Timur

Selain rekomendasi tersebut di atas, Kedepuitian Bidkooor Kamtibmas telah melakukan rapat koordinasi membahas Penanganan Narkotika dan Terorisme yang diprakarsai oleh Asdep Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, berkontribusi pada meningkatnya penyelesaian kejahatan transnasional pada tahun 2018, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Data Kejahatan Transnasional
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	KEJAHATAN TRANSNASIONAL	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	32.385	24.603	38.625	32.997
2	Psikotropika	1.864	1.114	963	744
3	Terorisme	27	30	53	30
4	Perompakan/Pembajakan	56	22	29	13
5	Perdagangan Manusia/ <i>Trafficking In Person</i>	123	97	183	190
6	Pencucian Uang/ <i>Money Laundry</i>	34	18	136	97
7	Kejahatan Dunia Maya/ <i>Cyber Crime</i>	168	61	235	58
8	Penyelundupan Senjata Api/ <i>Arm Smugling</i>	39	247	41	33
9	Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/ <i>Trans Economy Crime</i>	18	10	10	17
10	Indag.	344	79	227	55
11	Pertambangan.	38	9	33	9
12	Perbankan.	323	61	549	93
13	Uang Palsu.	116	48	88	69
14	Ketenagakerjaan/TKI	195	136	244	131
15	Kejahatan Trans Nasional Lainnya	368	506	561	325
	JUMLAH	36.098	27.041 (75%)	41.977	34.861 (83%)
	Capaian Kinerja	107%		127%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak **36.098 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **27.041 kasus (75%)**. Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak

41.977 kasus dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **34.861 kasus (83%)**. Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **107%** dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **127%**. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah Narkoba, Perbankan dan *Cyber Crime*.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target penyelesaian penanganan kejahatan transnasional adalah Kasus Narkoba merupakan kejahatan transnasional yang pada tahun 2018 terjadi sebesar 38.625 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 32.997 kasus atau sebesar 85%. Selanjutnya kasus perdagangan manusia yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 183 kasus dengan penyelesaian sebanyak 190 kasus atau sebesar 104%.

4) Penyelesaian tindak pidana kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan transportasi

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Rekomendasi yang telah dikeluarkan yang berhubungan dengan target penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi adalah sebagai berikut :

- a) Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Gubernur Banten, Dirjen Migas Kementerian ESDM Nomor : B-384/KM.02.03/03/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hasil koordinasi penanganan konflik sosial kegiatan reklamasi oleh PT. Multimas Nabati Asahan (PT. MNA) dan PT. Shensua Gouhua Pembangkitan Jawa-Bali (PT. SGPJB)
- b) Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Kabareskrim Polri, Dirjen Penanganan Masalah Agraria Kementerian ATR/BPN, dan JAM Pidum Kejaksaan Agung, Gubernur Riau, Bupati Kampar, Bupati

Pelalawan, Bupati Kuantan Singingi, Kapolda Riau, Kajati Riau, Danrem 031/Wirabima Nomor: B-439/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyampaian hasil koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kasus TN Tessonilo

- c) Rekomendasi dari Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kabareskrim Polri, Gubernur Riau, Bupati Kampar Nomor: B-440/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Tindaklanjut penyelesaian perambahan hutan di luar HGU PT. Clliandra Perkasa (PT. Pertisa) di Provinsi Riau
- d) Rekomendasi Sesmenko Polhukam kepada Dirjen Marga Kementerian PUPR dan Dirut PT. Jasa Marga (Persero), Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kapolda Sulawesi Utara, Walikota Bitung dan Bupati Minahasa Utara Nomor: 441/KM.02.03/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Hasil koordinasi membahas pengaduan masalah tanah dengan rincian pengaduan atas pelanggaran prosedur, aturan, dan UU Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara
- e) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menko Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Kapolri, Panglima TNI Nomor: B-80/KM.02.03/4/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas gangguan keamanan/ permasalahan yang menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN)
- f) Rekomendasi dari Menko Polhukam kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Para Gubernur, Para Bupati dan Para Walikota Nomor : R-94/KM.00.01/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas keamanan dan keselamatan transportasi angkutan sungai, danau dan perairan (ASDP).

Dari Rekomendasi yang dihasilkan sudah ditindaklanjuti oleh K/L terkait sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan rapat membahas mitigasi resiko terkait kegiatan reklamasi PT MNA dan PT SGPJB yang dihadiri oleh Ditjen Migas. Salah satu hasil point mitigasi resiko adalah akan memastikan desain sehingga tidak menimbulkan deformasi pipa.
- 2) Pembentukan Tim Implementasi Pengelolaan Ekosistem Tesso Nilo telah dibentuk berdasarkan SK MenLHK No. SK 72/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2018 tanggal 07 Februari 2018. Tim tersebut melakukan bedah kinerja atas ijin-ijin konsesi disekitar kawasan ekosistem Tesso Nilo dan menyusun master plan dan site plan pengelolaan kawasan ekosistem Tesso Nilo dengan prinsip pengembangan berbasis masyarakat.
- 3) Laporan Bupati Kampar kepada Menko Polhukam melalui Surat Nomor: 525/DISBUN/191 tanggal 13 Agustus 2018 yang memuat penyelesaian konflik PT. Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.
- 4) Penyampaian hasil rapat koordinasi membahas gangguan keamanan/ permasalahan yang menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) Nomor S-33/D.VI.M.EKON.KPIIP /04/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Permohonan dukungan penyelesaian permasalahan lahan kereta api Bandara Adi Sumarmo.

Untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, Deputi Bidkoo Kamtibmas telah membentuk Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) sesuai dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor 23 Tahun 2018. Desk PGKDN bertugas untuk mengkoordinasikan penanganan konflik berlatarbelakang Lahan dan Kehutanan, penanganan konflik berlatarbelakang pertambangan dan penanganan konflik berlatarbelakang SARA dan Hubungan Industrial.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kedeputusan Bidkoor Kamtibmas untuk mendorong K/L yang menangani penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi pada kontijensi, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Rekapitulasi data kejahatan yang berimplikasi kontijensi
Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	KEJAHATAN YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	Konflik Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (Sara)	3	3	-	1
2	Separatisme	25	25	25	1
3	Terhadap Keamanan Negara/Makar	4	1	-	-
4	Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres	-	-	-	-
5	Konflik Oknum TNI-Polri/Konflik Aparat	8	4	-	-
6	Bentrok Massa	58	58	29	29
7	Unjuk Rasa Anarkis	12	12	11	11
8	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	16	16	11	11
9	Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya	51	19	7	6
	JUMLAH	177	138 (78%)	83	59 (71%)
	Capaian Kinerja	114%		118%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah tindak pidana pada tahun 2017 adalah sebanyak **177 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **138 kasus (78%)**. Sedangkan jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak **83 kasus** dengan jumlah penyelesaiannya sebesar **59 kasus (71%)**. Dari perbandingan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar **114%** dan capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **118%**. Beberapa kasus yang kejadiannya cukup banyak

menyumbang tingginya jumlah tindak pidana pada tahun 2018 adalah Bentrok Massa.

Analisa penyebab keberhasilan dalam pencapaian target penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah :

- 1) Penyebab keberhasilan pemenuhan target penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontijensi sebesar 60% adalah pada kejahatan bentrok massa pada tahun 2018 terjadi sebanyak 29 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 29 kasus atau sebesar 100%;
- 2) Pada tahun 2018, jumlah kasus yang berimplikasi kontijensi mengalami penurunan dari 177 kasus pada tahun 2017 menjadi 83 kasus pada tahun 2018. Selain itu jumlah penyelesaian tindak pidana kontijensi pada tahun 2018 diatas target yang ditentukan yaitu 71 %.

b. Realisasi Kinerja Tahun 2018

**Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tahun 2018**

Indikator Kinerja	Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :			
a. Penyelesaian tindak pidana konvensional;	55%	61%	111%
b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara;	60%	61%	101%
c. Penyelesaian tindak pidana transnasional;	65%	83%	127%
d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	60%	71%	118%

Analisa realisasi kinerja tahun 2018. Dari data tersebut di atas dapat terlihat bahwa seluruh indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan agar penyelesaian tindak pidana semakin baik adalah:

- 1) Meningkatkan sinergitas antar aparat penegak hukum;

- 2) Meningkatkan kegiatan operasi khusus untuk menekan terjadinya tindak pidana dan meningkatkan penyelesaian tindak pidana;
- 3) Meningkatkan kerjasama antar satuan kerja yang ada di wilayah.

2. Analisis Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II: Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Indikator: Presentase realisasi penyerapan anggaran dan Nilai akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.8
Target dan realisasi kinerja tahun 2018

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi 2018	Capaian
a. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%	98,92%	110%
b. Nilai akuntabilitas kinerja	BB	79,32 (BB)	79,32 (BB)

a. Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kedeputan Bidkooor Kantibmas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 13.979.131.684 dari Rp. 14.132.270.000. Anggaran yang tersisa sebesar Rp. 153.138.316 (daya serap 98,92 %).

Analisa dari penyerapan anggaran yang memenuhi target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018

UNIT SATKER	PAGU	TARGET	REALISASI	%	SISA
Deputi V/ Kantibmas	14.132.270.000	90%	13.979.131.684	98,92 %	153.138.316
Asdep 1	3.317.317.000	-	3.273.403.499	98,67 %	43.913.501
Asdep 2	1.513.060.000	-	1.503.470.635	99,37 %	9.589.365
Asdep 3	3.031.812.000	-	3.026.034.042	99,81 %	5.777.958
Asdep 4	5.363.153.000	-	5.295.146.260	98,73 %	68.006.740
Sesdep	906.928.000	-	881.077.248	97,15 %	25,850,752

Data tabel tersebut diatas, dapat di analisa daya serap anggaran, Tahun 2018 pada Kedeputian Bidkooor Kamtibmas yaitu 98,92% sudah melewati target yang ditetapkan yaitu 90 %

Dari penjelasan kalimat diatas, dapat di analisa daya serap anggaran subsatker yang ada pada Kedeputian Bidkooor Kamtibmas, yaitu:

- 1) Pada Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat Dan Obyek Vital Nasional dari PAGU awal sebesar Rp. 3.317.317.000 telah terserap sebesar Rp. 3.273.403.499 (98,67%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 43.913.501,-
- 2) Pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional Dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara dari PAGU awal sebesar Rp. 1.513.060.000 telah terserap sebesar Rp. 1.503.470.635 (99,37%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 43.913.501,-
- 3) Pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional Dan Kejahatan Luar Biasa dari PAGU awal sebesar Rp. 3.031.812.000 telah terserap sebesar Rp. 3.026.034.042 (99,81%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.777.958,-
- 4) Pada Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi dari PAGU awal sebesar Rp. 5.363.153.000 telah terserap sebesar Rp. 5.295.146.260 (98,73%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 68.006.740,-
- 5) Pada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari PAGU awal sebesar Rp 906.928.000 telah terserap sebesar Rp. 881.077.248 (97,15%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 25.850.752,-

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.10
Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I
di lingkungan Kemenko Polhukam TA. 2018

Unit Kerja	Nilai		
	2016	2017	2018
Kedeputian Bidkooor Kamtibmas	79,06	70,35	79,32

Dari tabel tersebut di atas, dapat di gambarkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kedeputian Bidkoor Kamtibmas adalah sebesar 79,32 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Skor perencanaan kinerja 23,29% (skala 30%);
- 2) Skor pengukuran kinerja 20,10% (skala 25%);
- 3) Skor Pelaporan kinerja 13,00% (skala 15%);
- 4) Skor evaluasi kinerja 7,75% (skala 10%);
- 5) Skor capaian kinerja 15,18% (skala 20%).

3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Keuangan

Tabel 3.11
Sumber Daya Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Penyerapan Anggaran (Rp)
		Target	Realisasi	%	
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	Kemampuan penanganan permasalahan Kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi :				
	a. Penyelesaian tindak pidana konvensional	55%	61%	111%	1.503.470.635 (99,37%)
	b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara	60%	61%	101%	
	c. Penyelesaian tindak pidana transnasional	65%	83%	127%	3.026.034.042 (99,81)
	d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi	60%	71%	118%	3.273.403.499 (98,73%)
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penyerapan anggaran	90%	98,92%	110%	13,979,131,684 (98,92%)
	b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	79,32 (BB)	100%	

Tahun 2018 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdapat efisiensi anggaran di awal tahun sebesar Rp. 10.183.235.000,- dan efisiensi anggaran di pertengahan tahun sebesar Rp. 1.447.720.000,-

b. Sumber Daya Manusia

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dalam pencapaian target kinerja tahun 2018 walaupun dengan jumlah pegawai yang belum sesuai dengan Peta Jabatan yang seharusnya pada Kedeputian Bidkooor Kamtibmas tetapi kinerja yang sudah diperjanjikan tetap bisa dicapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen pimpinan yang selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja serta peningkatan di bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan sistem/metode.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, Kedeputian Bidkooor Kamtibmas telah meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kedeputian Bidkooor Kamtibmas dengan mengirim personil untuk studi banding yaitu Diklat ke Ciawi dalam rangka pelatihan dasar CPNS, personil yang dikirim adalah : Veda Darari Hanifati, Analis Kejahatan Transnasional pada Deputi Bidkooor Kamtibmas dan Asmoro Aji, Analis Kejahatan Konvensional pada Deputi Bidkooor Kamtibmas dan 4 orang pegawai Kedeputian Bidkooor Kamtibmas meningkatkan kualitasnya dengan menempuh pendidikan S2.

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Sebagai Ketua Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT)

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 25 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Gerakan Indonesia Tertib, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

- a. Tugas : Membantu Menko Polhukam dalam mengkoordinasikan Program Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggungjawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib;
- b. Fungsi :
 - 1) Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan Program Gerakan Indonesia Tertib;
 - 2) Perumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Tertib;

- 3) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Program Gerakan Indonesia Tertib;
- 4) Sosialisasi fokus Program Gerakan Indonesia Tertib; dan
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Tertib.

2. Sebagai Ketua Desk Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

- a. Tugas : Membantu Menko Polhukam dalam membantu memantau, menyinkronkan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
- b. Fungsi :
 - 1) Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
 - 2) Sinkronisasi koordinasi dan pengendalian perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
 - 3) Penetapan langkah-langkah dan/atau upaya yang diperlukan dalam rangka penanganan pengungsi dari luar negeri yang meliputi penemuan, pengamanan, penampungan, dan pengawasan keimigrasian dan penanganan penyelundupan manusia;
 - 4) Sinkronisasi koordinasi dan pengendalian langkah-langkah dan/atau upaya penegakan hukum terhadap sindikat/pelaku penyelundupan manusia;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;
 - 6) Pelaksanaan kerjasama dengan negara asal, negara transit dan negara tujuan, serta kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia dan/atau

organisasi internasional lainnya dalam penanganan pengungsi dari luar negeri dan penyelundupan manusia;

- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Penyelundupan Manusia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

3. Sebagai Ketua Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)

Berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 23 Tahun 2018 tentang Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, adapun tugas dan fungsi terkait hal tersebut adalah :

a. Tugas :

- 1) Membantu Menko Polhukam dalam membantu memantau, menyinkronkan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan penanganan gangguan keamanan dalam negeri;
- 2) Memantau pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial baik horizontal maupun vertikal yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ daerah.

b. Fungsi :

- 1) Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;
- 2) Perumusan kebijakan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial;
- 4) Pengembangan kerjasama dengan kementerian/ lembaga/ daerah baik tingkat nasional maupun daerah dalam rangka penanganan gangguan keamanan dalam negeri yang diakibatkan konflik sosial

D. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kedeputan Bidkooor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat TA. 2018 adalah sebesar Rp. 14.132.270.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.979.131.684,- sehingga persentase penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 98,92%.

Tabel 3.12
Tabel Anggaran Berbasis Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi: a. Penyelesaian tindak pidana konvensional; b. Penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara; c. Penyelesaian tindak pidana transnasional; d. Penyelesaian tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.	13.225.342.000	13.098.054.436	99,03%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase realisasi penyerapan anggaran b. Nilai akuntabilitas kinerja	906.928.000	881.077.248	97,15%

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputy Bidkooor Kamtibmas Kemenko Polhukam pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIP tahun 2018 Deputy Bidkooor Kamtibmas memuat laporan pencapaian kinerja selama kurun waktu periode tahun 2018 yang dituangkan ke dalam dua sasaran strategis dengan enam indikator kinerja. Berdasarkan tujuan dan sasaran, dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat maka upaya pencapaian perjanjian kinerja Deputy Bidkooor Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2018 telah dapat mencapai target sesuai yang direncanakan.

Tantangan dalam mengatasi berbagai persoalan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di masa depan adalah adanya situasi yang sangat dinamis di berbagai aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kondisi politik dan ekonomi, penyebaran paham radikalisme yang semakin masif, masih adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. Deputy Bidkooor Kamtibmas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mencapai kinerja mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terus berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, program dan sasaran pemerintah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan, perbaikan di masa yang akan datang.

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan kemampuan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, laporan kinerja ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan acuan dalam perencanaan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidkooor Kamtibmas



Carlo B. Tewu